

Tren penindakan kasus korupsi memperlihatkan korupsi di bidang Pendidikan masih menjadi salah satu poin terbanyak yang dituntut oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH). Sejak tahun 2016 sampai 2021, bidang Pendidikan termasuk lima besar koruptor selain bidang anggaran desa, pemerintahan, transportasi dan perbankan. Selama periode ini, ICW mencatat 20 kasus korupsi di bidang Pendidikan. Nilai kerugian negara sejak 2017 sebesar Rp 1,6 triliun. (anti korupsi.org). Penipuan di bidang Pendidikan sangat umum terjadi dan setiap tahun terjadi penipuan di berbagai daerah dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Dalam hal ini, dugaan kecurangan terjadi di SMK Negeri 1 Klungkung, Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klungkung telah mengidentifikasi tanda-tanda pelanggaran hukum terkait pengelolaan dana Pendidikan selama tahun 2020, 2021, dan 2022. Indikasi pelanggaran yang ditemukan adalah penggunaan ganda anggaran. Penyidik Triarta Kurniawan mengatakan bahwa “Dana Pendidikan ini mencakup dana BOS dan uang komite. Ditemukan indikasi adanya double anggaran kegiatan yang telah dibiayain menggunakan dana BOS, dan dibiayai lagi menggunakan uang komite”.

47 | Hita Akuntansi dan Keuangan

KAJIAN PUSTAKA

Teori segitiga penipuan atau "*Fraud Triangle*" terdiri dari tiga unsur penting dalam audit yaitu: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam kerangka pengendalian internal, lebih berfokus pada unsur kesempatan. Perlu adanya sistem pengendalian internal (SPI) yang efisien guna mengurangi risiko tindakan penipuan atau penyimpangan. Dengan sistem yang baik, informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan sesuai prosedurnya. Sebaliknya, apabila pengendalian internal tidak memadai maka dapat meningkatkan tindak penipuan. Berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 mengenai SPI, yang dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi, dengan tujuannya guna memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya secara efisien, menyediakan laporan keuangan yang bisa dipercaya, melindungi aset negara, serta mematuhi semua regulasi dan undang-undang yang berlaku. Penelitian Hielnanda Yasmin Azzahra (2021) dan Lisa Ragmadhani (2020) mengungkapkan SPI memberikan dampak positif signifikan pada Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS sehingga dibuat hipotesis pertama seperti berikut:

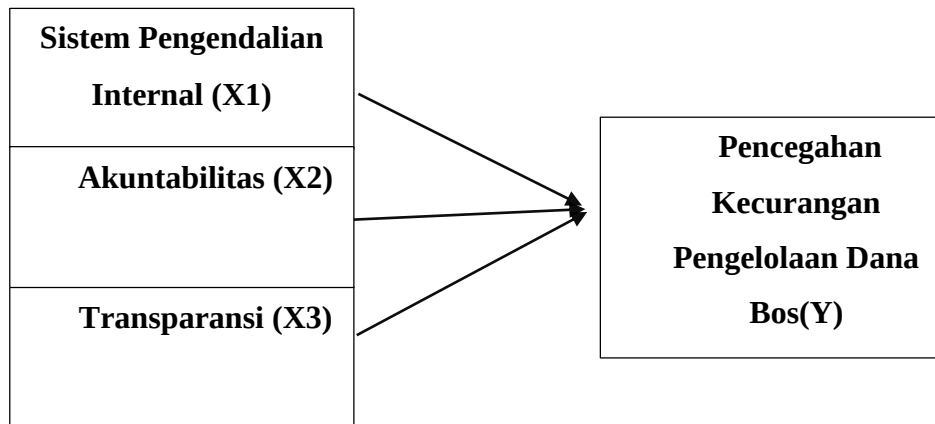
Menurut Edy Sutrisnom (2009), akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh seseorang yang menerima amanah dalam mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan tindakannya yang terkait dengan amanah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengelolaan keuangan sekolah harus dikelola secara transparan dan dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas, ini dijalankan guna meminimalisir risiko tindakan penipuan atau penyimpangan

H2 = Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS.

H3 = Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS.

Pada studi ini, data dikumpulkan melalui kuesioner atau angket sebagai sumber data primer. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut diubah menjadi bentuk angka atau data kuantitatif. Data tersebut kemudian dianalisis melalui SPSS menggunakan analisis regresi berganda. Salah satu cara analisis yang dilakukan adalah uji kualitas data, yang dapat mempengaruhi validitas sebuah penelitian. Untuk memastikan kualitas penelitian yang baik, penting untuk menggunakan instrumen yang valid dalam pengumpulan data untuk memastikan keakuratannya (Sugiyono, 2013).

Adapun kerangka berfikir pada studi ini yaitu:



Populasi yang digunakan pada studi ini yaitu seluruh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah maupun Bendahara Komite Sekolah pada semua SMA dan SMK di Kabupaten Klungkung, dengan jumlah 54 responden. Alasan pemilihannya karena mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bos sekolah dan lebih mengetahui terkait alur atau teknis pemakaian dana bos sekolah baik itu untuk pembiayaan operasional pendidikan yang berupa pengadaan barang atau jasa untuk kebutuhan pendidikan. Teknik analisis penelitian ini meliputi:

1. Uji validitas memeriksa kemampuan suatu alat atau instrumen dalam mengukur konsep yang ingin diteliti dengan tepat. Jika instrumen tersebut mampu mencapai tujuannya dengan baik, maka data yang dihasilkannya akan memiliki tingkat validitas yang tinggi.
2. Uji reliabilitas data bertujuan untuk menilai sejauh mana alat atau instrumen pengukuran menunjukkan konsistensi dan keandalan dalam mengungkapkan karakteristik atau gejala yang sama dari sekelompok individu, bahkan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi yang sama atau berbeda waktu (Silalahi, 2013:h.139).
3. Uji normalitas diperuntukan guna memeriksa variabel gangguan pada model regresi mempunyai distribusi normal. Terdapat tiga metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi apakah residual tersebut berdistribusi normal. Metode pertama yaitu menilai visualisasi plot probabilitas normal (Ghozali, h.47). Data residual yang normal akan menghasilkan plot yang membentuk garis lurus diagonal. Apabila data residual sesuai dengan distribusi normal, garis plot akan mengikuti garis diagonal tersebut. Metode kedua untuk menguji normalitas adalah menggunakan pengujian nonparametrik One-Sample K-S dengan level sig. 0,05. Bila nilai sig. melebihi 0,05, ini menunjukkan data berpotensi memiliki distribusi normal, dan sebaliknya.
4. Uji multikolinearitas digunakan guna menilai apakah ada keterikatan antar variabel independen pada model regresi. Baiknya model regresi dapat dinilai dari tidak adanya kolerasi atau hubungan kuat antara variabel-variabel independennya.

5. Uji heteroskedastisitas dilakukan guna memeriksa adanya perbedaan dalam *varians* dari residual antar pengamatan (Ghozali, 2006:134).
6. Metode yang diperuntukan guna menganalisa data penelitian yaitu regresi linier berganda. Sebelum melaksanakan analisis, dilaksanakan pemeriksaan terhadap variabel-variabel yang akan digunakan untuk mencegah kemungkinan bias dalam pengujian (Ghozali, 2016:3). Persamaan model regresi linier bergandanya yakni:
$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$
7. Koefisien determinasi (R^2) guna memeriksa tingkat kemampuan model dalam menerangkan variace variabel dependen.
8. Uji F ini diperuntukan guna memeriksa pengaruh beberapa variabel independen terhadap varaibel dependen.
9. Uji t diperuntukan guna mengevaluasi pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel lainnya tetap. Hasil uji ditentukan melalui perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung < t tabel, maka variabel independen berdampak signifikan terhadap variabel dependennya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan menentukan rerata dari respons yang diberikan oleh responden untuk setiap variabel.

Tabel 1 Hasil Statistic Descriptive

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	54	30	50	41.30	5.396
Akuntabilitas	54	30	50	40.43	5.689
Transparansi	54	33	50	42.69	4.526
Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS	54	24	40	33.04	4.256

Pada tabel memperlihatkan N dari setiap variabel yang valid yaitu 54. SPI menunjukan nilai minimum 30.00, nilai maximum 50.00, rerata 41.30 dan standar deviasinya 5.396. Akuntabilitas, nilai minimum 30.00, nilai maximum 50.00, rerata 40.43, standar deviasinya 5.689. Transparansi, nilai minimum 33.00, nilai maximum 50.00, rerata 42.69, standar deviasinya 4.526. Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS, nilai minimum 24.00, nilai maximum 40.00, rerata 33.04 dan standar deviasinya 4.256.

Hasil dari alat ukur studi ini menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga cocok digunakan sebagai instrumen penelitian. Pada tahap uji asumsi klasik memperlihatkan data

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil analisis di atas, maka dibuat persamaan regresi linier dibawah ini:

$b_1 = 0,170$ artinya Sistem pengendalian internal meningkat apabila akuntabilitas dan transparansi dianggap konstan maka diikuti oleh meningkatnya skor pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS sebesar 0,170.

$b_2 = 0,287$ artinya akuntabilitas meningkat apabila sistem pengendalian internal dan transparansi dianggap konstan maka diikuti oleh meningkatnya skor pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS sebesar 0,287.

$b_3 = 0,302$ artinya transparansi meningkat apabila sistem pengendalian internal dan akuntabilitas dianggap konstan maka terjadi peningkatan skor pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS sebesar 0,302.

Tabel 3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi didapat dari besaran *Adjusted R Square* dalam Tabel 4.16 sebesar 0,661 (66,10%). Koefisien determinasi yaitu 66,10%, berarti SPI, akuntabilitas dan transparansi mampu menjelaskan pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS sebesar 66,10%. Sisanya 33,90% (100% - 66,10%) dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	652.682	3	217.561	35.405	.000 ^b
	Residual	307.244	50	6.145		
	Total	959.926	53			

Tabel 5 Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,554	3,349		0,464	0,645
Sistem Pengendalian Internal	0,170	0,083	0,215	2,058	0,045
Akuntabilitas	0,287	0,104	0,383	2,767	0,008
Transparansi	0,302	0,134	0,321	2,245	0,029

Hasil uji t sistem pengendalian internal pada Tabel 4.17 di atas diperoleh *Standardized Coefficients Beta* yang menandakan arah positif yaitu 0,215 dan nilai t hitung 2,058 > t tabel 1,67591 serta level sig. 0,045 < 0,05 yang berarti SPI berdampak positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS. Jadi, hipotesis pertama diterima.

Hasil pengujian t akuntabilitas dalam Tabel 4.17 didapat *Standardized Coefficients Beta* yang menunjukkan arah positif yaitu 0,383 dan nilai t hitung 2,767 > t tabel 1,67591, level sig. sebesar 0,008 < 0,05 berarti akuntabilitas berdampak positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS. Jadi hipotesis kedua diterima.

Hasil pengujian t transparansi dalam Tabel 4.17 didapat *Standardized Coefficients Beta* yang menunjukkan arah positif yaitu 0,321 dan nilai t hitung 2,245 > t tabel 1,67591, level sig. 0,029 < 0,05 berarti transparansi berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS. Jadi hipotesis ketiga diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian tersebut, maka penulis menarik kesimpulan berikut. SPI berdampak positif signifikan pada Pencegahan kecurangan Pengelola dana BOS. Apabila pengendalian internal dijalankan dengan efektif, hal ini akan menghasilkan perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi yang jelas terhadap operasional sebuah organisasi. Dengan demikian, pencegahan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana BOS akan menjadi lebih efisien dan efektif. Akuntabilitas berdampak positif signifikan terhadap Pencegahan kecurangan Pengelola dana BOS. Dapat dikatakan makin baik dan tertib pelaksanaan akuntabilitas pada SMA dan SMK di Kabupaten Klungkung, maka pencegahan pengelolaan dana BOS akan semakin efektif. Transparansi berdampak positif signifikan dalam mencegah kecurangan Pengelola dana BOS. Adanya transparansi, maka semua pihak terkait, termasuk orang tua/wali murid sekalipun akan memperoleh informasi yang sama dengan pihak sekolah mengenai pengelolaan dana BOS sehingga pihak sekolah akan lebih transparan dalam mengelola dana BOS, pada akhirnya pencegahan kecurangan di sekolah tersebut akan meningkat.

Berlandaskan kesimpulan tersebut, maka disampaikan saran-saran yaitu: Berdasarkan nilai rata-rata terendah dari respons para responden terhadap Sistem pengendalian internal didapatkan bahwa pernyataan "Sekolah mampu menilai perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal" memperoleh skor terendah maka diperlukan adanya perhatian terhadapnya, maka pihak pimpinan disarankan untuk mampu memberikan pelatihan kepada pengelola dana BOS untuk bisa mengevaluasi perubahan yang berdampak pada sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan upaya pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan nilai rata-rata terendah dari respons para responden terhadap akuntabilitas didapatkan bahwa pernyataan "Adanya penyesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, baik dalam penyaluran, penggunaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban dana BOS" memperoleh skor terendah maka diperlukan adanya perhatian terhadapnya, maka pihak pengelola dana BOS perlu menyesuaikan antara implementasi dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana BOS, agar pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS lebih baik kedepannya. Berdasarkan nilai rata-rata terendah dari respons para responden terhadap transparansi diperoleh pernyataan "Tidak ada mekanisme pengaduan/sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan dalam pengelolaan dana BOS" memperoleh skor terendah maka diperlukan adanya perhatian terhadapnya, maka pihak pengelola dana BOS perlu menyediakan sistem pengaduan ataupun

DAFTAR PUSTAKA

- 55 | Hita Akuntansi dan Keuangan

Linda Purnama Sari (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi, dan Moralitas Terhadap Kecurangan Dana BOS pada SMA Kabupaten Pemalang.

Hielnanda Yasmin Azzahra (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Aparat, dan Implementasi Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Tangerang Tahun 2021).

Gregorius Jeandry (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris Pada Sekolah Dasar Kota Ternate).

Lisa Ragmadhani (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Banda Aceh.

Widyawati et al., (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Banda Aceh.

Cintya Ditaputri Manoppo (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Empiris pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Muara Jawa).